

**ANALISIS DETERMINAN TINGKAT
KEPATUHAN MATERIAL PEMILIK USAHA
KOS TERHADAP PAJAK HOTEL DI KOTA
SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

PRA TIWI PRINCESSWARA
NIM. 12020114120031

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Pratiwi Princesswara
Nomor Induk Mahasiswa : 12020114120031
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : **ANALISIS DETERMINAN TINGKAT
KEPATUHAN MATERIAL PEMILIK
USAHA KOS TERHADAP PAJAK HOTEL
DI KOTA SEMARANG**
Dosen Pembimbing : Dr. Agr. Deden Dinar Iskandar, S.E., MA

Semarang, 1 Mei 2018

Dosen Pembimbing,



(Dr. Agr. Deden Dinar Iskandar, S.E., MA.)

NIP. 197804022006041016

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Pratiwi Princesswara

Nomor Induk Mahasiswa : 12020114120031

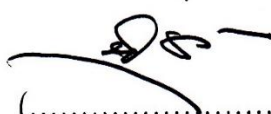
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS DETERMINAN TINGKAT
KEPATUHAN MATERIAL PEMILIK
USAHA KOS TERHADAP PAJAK HOTEL
DI KOTA SEMARANG**

Telah dinyatakan Lulus Ujian pada tanggal 30 Juli 2018

Tim Penguji :

1. Dr. Agr. Deden Dinar Iskandar, S.E., MA. (..........)

2. Dr. Hadi Sasana, SE, MS.i. (..........)

3. Evi Yulia Purwanti, SE, MS.i. (..........)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Pratiwi Princesswara, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEPATUHAN MATERIAL PEMILIK USAHA KOS TERHADAP PAJAK HOTEL DI KOTA SEMARANG**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak , dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 1. Mei 2018

Yang membuat pernyataan



Pratiwi Princesswara

12020114120031

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak Pernah Ada Hasil yang Mengkhianati Usaha”

-Unknown

“Ketika Kamu Memperoleh Sebuah Keberhasilan Percayalah Doa Orangtuamu Telah Didengar Oleh-Nya”

-Unknown

“When Motivation Runs Low, Dicipline Has To Take Over”

-Collin Mclelland

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah Goro Sumaryono
2. Bunda Hermin Sri Purnomowati
3. Abang Dekan Bramka
4. Kaka Brilliant Prima
5. Sahabat-sahabat
6. Almamater.

ABSTRACT

The reason for choosing this topic was based on the establishment of Dormitory Category of Hotel Taxation article 1 verse 6 Regional Regulation of Semarang City number 3 of 2011 about Tax on Hotels and Inns. The collection of Dormitory Tax on Semarang City has begun from 2013, but even until 2016 the tax collection target was not achieved. Because of the latter, the research was commenced in the intention of finding out the cause of this nonobedience of tax collecting process. This research uses 1 dependent variable which is Tax Compliance and 7 independent variables of Income, environment, tax sanctions, tax services & appeals, tax awareness, perception on transparency of tax usage & allocation, and perception & accountability of efficiency of tax payment system. The data used on this research is prime data from questionnaire attended by 110 respondents which made of various dormitory owners in Semarang City that are officially listed as Taxpayer, and also secondary data that is used as support data for this research. Respondents were chosen from random sampling. The Data Analysis Method used in this research is double linear regression analysis with the use of SPSS 22 program for Windows. The result shown by this research are: (1) The variables of Income, tax services & appeals, perception on transparency of tax usage & allocation, and perception & accountability of efficiency of tax payment system are significantly influence the tax payment of taxpayer in Semarang City. (2) Variables of environment, Tax sanctions and Tax awareness are insignificantly influence the tax payment of taxpayer in Semarang City.

Key words: Tax Obedience, Dormitory Tax, Income, Environment, Tax Sanction, Tax Services & Appeals, Tax Awareness, Perception on transparency of tax usage & allocation, Perception & Accountability of efficiency of tax payment system, Double Linear Regression.

ABSTRAK

Pemilihan topik penelitian ini dilatar belakangi dengan penetapan peraturan atas pemungutan pajak hotel kategori rumah kos yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Pemungutan pajak kos di kota Semarang sudah dimulai sejak tahun 2013 lalu, namun dalam prosesnya sampai dengan tahun 2016 pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak kos masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan material wajib pajak hotel kategori rumah kos di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan 1 variabel dependen yaitu kepatuhan pajak dan 7 variabel independen yaitu pendapatan, lingkungan, sanksi pajak, sosialisasi dan pelayanan perpajakan, kesadaran, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas dan persepsi efektivitas sistem pembayaran pajak. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuisioner kepada 110 responden yang merupakan pemilik kos di Semarang yang tergolong sebagai wajib pajak patuh secara formal, serta data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Responden didapat dengan metode random sampling. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 22 *for Windows*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Variabel pendapatan, sosialisasi dan pelayanan perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas serta persepsi efektivitas sistem pembayaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan material wajib pajak kos di Kota Semarang. (2) Variabel lingkungan, sanksi dan kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan material wajib pajak kos di Kota Semarang.

Kata kunci: Kepatuhan Material, Pajak Kos, Pendapatan, Lingkungan, Sanksi Pajak, Sosialisasi dan Pelayanan Perpajakan, Kesadaran, Persepsi Penggunaan Uang Pajak Secara Transparan dan Akuntabilitas, Persepsi Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak, Linear Berganda

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, izin dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan judul Analisis Determinan Tingkat Kepatuhan Material Wajib Pajak Kos di Kota Semarang. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu prasyarat dalam menyelesaikan program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih atas doa, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Akhmad Syakir Kurnia, SE., MSi., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
3. Firmansyah, SE., MSi., Ph.D selaku dosen wali atas segala ilmu dan bimbingannya selama ini kepada penulis selama menempuh studi.
4. Dr. Agr. Deden Dinar Iskandar, S.E., MA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak pengarahan dengan penuh sabar kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis khususnya jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. KESBANG POL LINMAS Kota Semarang, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, bapak Bagus selaku staf BAPENDA kota Semarang yang telah memberikan ijin dan membantu penulis dalam memperoleh ketersediaan data selama pelaksanaan penelitian dan seluruh responden

yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi data yang dibutuhkan penulis.

7. Ayah Goro, Bunda Hermin, Kaka Dekan Bramka dan Brilliant Prima yang selama ini sudah mendoakan dan memberikan semangat lahir batin kepada penulis sehingga penulis dapat segera menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
8. Maulana Eka Putra yang selalu ada untuk memberikan motivasi, dukungan, semangat, saran dan turut serta menemani dalam proses survei pencarian data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Afidatunnisa yang selalu tidak bosan memberikan semangat, menemani dalam proses pencarian data dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.
10. Rointan Permata Sari yang selalu menemani, memberikan motivasi dan mengajak penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan dari semester satu Arin, Via, Nadia, Lita, Dian, Ratih, Raissa, makasih atas kebersamaannya selama ini.
12. Seluruh teman-teman IESP 2014 untuk pengalaman dan pembelajaran selama ini, terima kasih banyak.

Penulis sangat menyadari bahwa sampai dengan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Semarang, 1 Mei 2018

Penulis



Pratiwi Princesswara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Kegunaan Penelitian.....	17
1.5 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Landasan Teori.....	20
2.1.1 Pajak.....	20
2.1.2 Pajak Daerah.....	27
2.1.3 Pajak Hotel.....	30
2.1.4 Pajak Hotel Kategori Kos.....	32
2.1.5 Wajib Pajak Orang Pribadi Memiliki Usaha.....	36
2.1.6 Kepatuhan Pajak (<i>Tax Compliance</i>).....	37
2.1.7 Teori Tindakan Beralasan.....	40
2.1.8 Teori Atribusi.....	50
2.2 Penelitian Terdahulu.....	59
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	77
2.4 Hipotesis Penelitian.....	83
BAB III METODE PENELITIAN.....	84
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	84
3.1.1 Variabel Dependen.....	85
3.1.2 Variabel Independen.....	86
3.2 Populasi dan Penentuan Sampel.....	93
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	96
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	97

3.5 Metode Analisis Data	97
3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas	98
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	98
3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	100
3.5.4 Uji Hipotesis dan Signifikansi	102
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	105
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	105
4.1.1 Gambaran Umum Kota Semarang	105
4.1.2 Demografis Kota Semarang	106
4.1.3 Karakteristik Responden	107
4.1.3.1 Karakteristik Demografi	109
4.1.3.2 Karakteristik Ekonomi	116
4.2 Analisis Data	121
4.2.1 Deskripsi Statistik	121
4.2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas	127
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	131
4.2.3.1 Normalitas	131
4.2.3.2 Multikolinearitas	132
4.2.3.3 Heterokedastisitas	133
4.2.4 Uji Regresi Linear Berganda.....	135
4.2.5 Pengujian Hipotesis.....	136
BAB V PENUTUP.....	152
5.1 Kesimpulan	152
5.2 Keterbatasan	153
5.3 Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN	161

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2013-2016...	3
Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2012-2016	5
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2012-2015	6
Tabel 1.4 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Kategori Pajak Hotel Tahun 2013-2016	8
Tabel 1.5 Data Persebaran Pemilik Usaha Kos per Kecamatan di Kota Semarang	11
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	68
Tabel 3.1 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Kepatuhan	86
Tabel 3.2 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Pendapatan	87
Tabel 3.3 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Lingkungan	88
Tabel 3.4 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Sanksi Pajak	89
Tabel 3.5 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Sosialisasi dan Pelayanan Perpajakan.....	90
Tabel 3.6 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Kesadaran.....	91
Tabel 3.7 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Persepsi Penggunaan Uang Pajak Secara Transparan dan Akuntabilitas	92
Tabel 3.8 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Persepsi Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak	93
Tabel 3.9 Data Persebaran Populasi dan Sampel Pemilik Usaha Kos per Kecamatan di Kota Semarang	95
Tabel 4.1 Indikator Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang Tahun 2012-2016	107
Tabel 4.2 Rincian Penyebaran Kuisioner	108
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	110
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	111
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	112
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	114
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan	115
Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha	117
Tabel 4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kamar.....	118
Tabel 4.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan	119
Tabel 4.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Mayoritas Penghuni.....	121
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas.....	128

Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Keseluruhan	129
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas	130
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas (<i>Kolmogorov Smirnov</i>)	131
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas.....	132
Tabel 4.17 Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Glesjer)	133
Tabel 4.18 Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Park).....	134
Tabel 4.19 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	135
Tabel 4.20 Hasil Uji F.....	137
Tabel 4.21 Hasil Koefisien Determinasi	138
Tabel 4.22 Hasil Uji Parsial (Uji-t)	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	78
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Semarang.....	106
Gambar 4.2 Variabel Pendapatan.....	122
Gambar 4.3 Variabel Lingkungan.....	122
Gambar 4.4 Variabel Sanksi	123
Gambar 4.5 Variabel Sosialisasi dan Pelayanan Perpajakan	124
Gambar 4.6 Variabel Kesadaran	125
Gambar 4.7 Variabel Persepsi Penggunaan Uang Pajak Secara Transparan dan Akuntabilitas	126
Gambar 4.8 Variabel Persepsi Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak.....	127

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	162
Lampiran B.....	175
Lampiran C.....	180
Lampiran D	201
Lampiran E.....	209

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi (Setiandy, 2012). Sejak era otonomi daerah resmi diberlakukan pada 1 Januari 2001 setiap daerah di Indonesia memiliki hak berkreasi guna mendapat sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah daerah masing-masing. Pengertian dari otonomi daerah itu sendiri adalah kewenangan, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Salah satu yang menjadi konsep dasar otonomi daerah adalah adanya peningkatan efisiensi dari administrasi keuangan daerah dan adanya pengaturan yang jelas atas sumber pendapatan negara maupun daerah. Pendapatan yang dimaksud merupakan pendapatan yang didapat dari sumber penerimaan, salah satu contohnya seperti retribusi dan pajak. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan diberbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat (Siahaan, 2005).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Penerimaan Daerah dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dari sifat memaksa yang dimiliki, hingga saat ini, pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diandalkan untuk pemenuhan kebutuhan rutin Daerah. Kontribusi yang didapat dari pajak daerah dapat dijadikan penunjang bagi pelaksanaan otonomi daerah dan terpenuhinya tujuan dari otonomi itu sendiri yaitu optimalisasi potensi daerah.

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang menganut sistem otonomi daerah untuk melaksanakan sistem pemerintahannya. Guna tercapainya tujuan dari sistem otonomi daerah diperlukan biaya yang cukup besar yang didapat dari sumber penerimaan daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah dimana dapat disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna untuk menunjang pelaksanaan dari otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam mendanai

pelaksanaan dari otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Hal tersebut merupakan suatu perwujudan dari Desentralisasi.

Adapun sumber penerimaan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi PAD dari sumber penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun memiliki jumlah penerimaan tertinggi jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Hal tersebut didukung oleh data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2013-2016 pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2013-2016
(dalam jutaan rupiah)

Sumber Penerimaan	2013	2014	2015	2016
1. Pajak Daerah	683.708	791.509	816.208	1.006.487
2. Retribusi Daerah	102.695	110.488	88.329	123.215
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.650	8.036	10.530	13.408
4. Lain-Lain PAD yang Sah	136.522	228.330	286.513	348.534
Jumlah	930.577	1.138.364	1.201.581	1.491.645

Sumber: semarangkota.go.id

Realisasi PAD Kota Semarang selama tahun 2013-2016 yang dijelaskan dalam Tabel 1.1 selalu mengalami peningkatan. Dari data 4 tahun terakhir yang didapat, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Dari tahun ke tahun Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang memiliki kontribusi terbesar apabila dibandingkan dengan sumber

penerimaan lainnya. Dapat dilihat contoh pada tahun 2016 Pajak Daerah menyumbang pendapatan sebesar Rp 1.006.487.472.776,- terhadap PAD Kota Semarang. Pencapaian tersebut paling tinggi jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya yaitu Retribusi Daerah sebesar Rp 123.215.026.523,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 13.408.979.748,- dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 348.534.421.018,-. Hal tersebut membuktikan bahwa Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang memiliki potensi tinggi dan dapat diandalkan oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas daerahnya dan memenuhi kebutuhan dasar daerah. Peningkatan kualitas yang dilakukan salah satunya dapat dengan melakukan pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, efek jangka panjang yang didapat dari pembangunan daerah secara tidak langsung akan memenuhi tujuan utama dari sistem otonomi daerah yaitu optimalisasi potensi daerah.

Klasifikasi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah secara rinci terbagi menjadi 12 yaitu, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak Hotel dimana dimaksud merupakan salah satu klasifikasi dari pajak daerah memiliki kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan pajak daerah. Hal tersebut didukung oleh data Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2012-2016 pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2012-2016

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2012	35.716.200.000	598.872.260.463	5,96
2013	44.674.905.002	683.708.489.950	6,53
2014	50.589.695.464	791.509.586.089	6,38
2015	55.445.095.950	816.208.853.788	6,79
2016	63.438.267.116	1.006.487.472.776	6,31

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Diolah (2018)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 kontribusi yang diberikan pajak hotel terhadap pajak daerah mengalami fluktuatif. Menurut Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2017), kontribusi penerimaan yang diberikan oleh pajak hotel termasuk dalam kategori tinggi yaitu lebih dari 5% terhadap pendapatan pajak daerah. Dari data 5 tahun terakhir yang didapat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 6,79% dari Pajak Daerah, dengan besar penerimaan Rp 55.445.095.950,-, dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 5,96% dari Pajak daerah, dengan besar penerimaan Rp 35.716.200.000,-. Jika dibandingkan dengan klasifikasi pajak daerah lainnya seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dll, kontribusi yang diberikan pajak hotel termasuk dalam kategori tinggi.

Realisasi pendapatan dari pajak hotel selama kurun waktu 5 tahun (2012-2016) selalu melebihi target anggaran pendapatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Hal tersebut didukung oleh data Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2012-2015 pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2012-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2012	32.000.000.000	35.716.285.776	111,61
2013	38.000.000.000	44.674.905.002	117,57
2014	44.000.000.000	50.589.695.464	114,98
2015	50.000.000.000	55.441.704.572	110,88

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Diolah (2018)

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa pencapaian realisasi Pajak Hotel di Kota Semarang dari tahun 2012-2015 selalu mencapai presentase lebih dari 100% yang artinya pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah kota ini atas Pajak Hotel selalu terpenuhi bahkan melampaui target anggaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 117,57% dengan realisasi sebesar Rp 44.674.905.002,- dari target Rp 38.000.000.000,-, sedangkan pencapaian terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 110,88% dengan realisasi sebesar Rp 55.441.704.572,- dari target Rp 50.000.000.000,-. Pencapaian realisasi yang selalu melampaui target, tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor terkait.

Status Kota Semarang sebagai kota metropolitan di Provinsi Jawa Tengah meningkatkan potensi dalam berbagai bidang. Potensi yang dimiliki seperti dalam bidang industri, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang perekonomian dan perdagangan. Dalam perkembangan bidang kebudayaan, Kota Semarang menarik perhatian turis asing maupun domestik untuk melakukan wisata di kota ini. Dengan banyaknya turis yang berkunjung ke kota ini akan meningkatkan permintaan atas penginapan yang dengan hal ini disebut hotel.

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, mengartikan pajak hotel sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan

oleh hotel. Selanjutnya hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Selain berkembang dalam bidang kebudayaan yang menarik perhatian para turis sebagai salah satu kota destinasi wisata, Kota Semarang juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan. Perkembangan tersebut ditandai dengan pembangunan berbagai universitas swasta dan negeri serta fasilitas pendidikan lainnya. Banyaknya fasilitas pendidikan yang berkembang di kota ini menyebabkan Semarang menjadi salah satu kota tujuan pelajar atau mahasiswa yang berada di sekitar daerah atau bahkan lingkup yang lebih luas (luar daerah, luar kota, luar pulau) untuk menimba ilmu. Banyaknya calon pelajar dan mahasiswa yang memiliki tujuan untuk menimba ilmu di kota ini meningkatkan jumlah permintaan atas tempat hunian sementara yaitu rumah kos. Dengan peningkatan permintaan tersebut secara signifikan mendorong individu atau badan untuk membangun usaha kos di kota ini. Sehingga rumah kos sebagaimana dimaksud tergolong dari kategori pajak hotel memiliki potensi yang tinggi untuk ditetapkan sebagai usaha kena pajak.

Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan melihat potensi besar yang diberikan oleh usaha kos serta berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam pasal 1 menetapkan bahwa rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 termasuk sebagai kategori pajak hotel yang dikenakan pajak dengan besaran pengenaan tarif sebesar 10% (sepuluh persen). Namun sejak diberlakukannya aturan tersebut, penerimaan dari pajak hotel kategori

rumah kos masih sangat rendah dan belum optimal. Hal tersebut didukung oleh data pada Tabel 1.4 yang menjelaskan mengenai Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Kategori Pajak Hotel Tahun 2013-2016. Adapun penjelasannya pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Kategori Pajak Hotel Tahun 2013-2016 (dalam jutaan rupiah)

Kategori	2013		2014		2015		2016	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Bintang 5	22.217	22.242	23.647	24.048	24.829	24.495	32.500	26.716
Bintang 4	3.515	5.684	4.398	6.649	7.389	7.550	9.300	10.986
Bintang 3	7.070	8.389	8.825	10.274	9.798	11.415	12.400	14.184
Bintang 2	1.807	3.214	3.755	5.285	4.162	6.822	5.109	8.734
Bintang 1	821	2.025	1.162	1.159	1.220	1.091	945	1.212
Melati 3	1.174	1.559	1.311	1.868	1.591	2.391	1.620	2.196
Melati 2	207	635	220	296	231	349	272	335
Melati 1	72	326	151	271	158	263	190	286
Rumah Kos	60.7	0	54.4	28.9	83.3	80.0	200.1	96.3
Wisma	1.050	398	467	590	546	858	491	1.004
Pariwisata								
Gedung Pertemuan	63	145	60	116	70	126	70	138

Sumber : Bapenda Kota Semarang Diolah (2018)

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa pengenaan pajak hotel kategori rumah kos pada tahun 2013-2016 belum berjalan optimal. Sejak Pemerintah Daerah resmi menetapkan usaha kos lebih dari 10 kamar merupakan kategori hotel, dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011, realisasi pemungutannya dimulai pada tahun 2013. Pada tahun pertama pemungutan realisasi pendapatan pajak hotel kategori kos sebesar 0% dari target. Tidak adanya pencapaian pada tahun pertama pemungutan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya dengan adanya *time-lag* atau jeda waktu. Menurut Hansen (2009) dalam bukunya yang berjudul *The Economic Theory of Fiscal Policy*, mengartikan time-

lag merupakan jarak waktu antara suatu pengamatan, perencanaan dan penerapan efek tindakan balasan. Apabila terjadi suatu gangguan dalam proses tersebut, akan menyebabkan suatu penundaan. Pengenaan pajak hotel kategori kos ini tergolong baru, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup untuk mendapatkan hasil pemungutan yang optimal.

Sejak ditetapkannya usaha kos sebagai usaha kena pajak, Pemerintah Daerah Kota Semarang rutin melakukan pencatatan dan survei kepada seluruh pemilik usaha kos yang ada. Hal tersebut dilakukan Pemerintah Daerah setempat untuk melihat jumlah potensi pendapatan yang akan didapat dari pajak hotel kategori kos. Selain itu, pencatatan dan survei yang dilakukan juga berbuhungan dengan target anggaran yang akan dibentuk. Sehingga apabila dilihat pada Tabel 1.4 dari tahun 2013-2016 realisasi pendapatan pajak kos kategori hotel mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun realisasi masih dibawah target yang telah ditetapkan. Rendahnya realisasi dari target (*shortfall*) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak itu sendiri.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) menjadi faktor yang paling berpengaruh atas tinggi rendahnya penerimaan pada sektor perpajakan. Pengertian dari kepatuhan pajak itu sendiri adalah kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi maupun badan untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Mulai dari kesadaran untuk melaporkan kewajibannya hingga pada proses pembayaran. Terdapat dua kategori kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal merupakan kepatuhan yang dimiliki wajib pajak

apabila telah melakukan kewajiban formalnya atas utang pajak yang dimilikinya (melaporkan kewajiban pajaknya), sedangkan kepatuhan material merupakan kepatuhan yang dimiliki wajib pajak apabila telah melakukan kewajiban materialnya atas utang pajak yang dimiliki (membayar pajak dan melaporkannya).

Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan persepsi atau kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Persepsi yang dimaksud dapat berupa persepsi terhadap sistem perpajakan, pengetahuan WP tentang pentingnya membayar pajak, dan sikap petugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Semakin baik persepsi yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang ada akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Namun sebaliknya, semakin buruk persepsi yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang ada, akan semakin menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya. Persepsi dapat didasari dengan pengetahuan dan pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang, dalam hal ini disebutkan dengan wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung penelitian terdahulu oleh Puspita (2014) yang menerangkan bahwa kesadaran membayar pajak menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.

Pada tahun 2015 Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang secara resmi mengeluarkan data persebaran pemilik usaha kos di Kota Semarang yang tersebar pada 16 kecamatan. Namun dari 16 kecamatan yang ada, hanya 12 kecamatan yang sudah terdaftar memiliki pemilik usaha kos kena pajak. Tabel 1.5 menunjukkan data

persebaran pemilik usaha kos per Kecamatan di Kota Semarang. Adapun datanya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Data Persebaran Pemilik Usaha Kos per Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Usaha Kos
1	Banyumanik	21
2	Candisari	3
3	Gajahmungkur	5
4	Gayamsari	18
5	Genuk	0
6	Gunungpati	258
7	Mijen	0
8	Ngaliyan	1
9	Pedurungan	1
10	Semarang Barat	25
11	Semarang Selatan	9
12	Semarang Tengah	9
13	Semarang Timur	2
14	Semarang Utara	0
15	Tembalang	114
16	Tugu	0
Total		466

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Diolah (2018)

Pada tabel 1.5 terlihat dari 16 kecamatan yang ada, hanya 12 kecamatan yang terdata memiliki pemilik usaha kos kena pajak. Kecamatan Gunungpati dan Tembalang merupakan dua kecamatan yang memiliki jumlah pemilik usaha kos kena pajak yang tergolong patuh formal tertinggi dibandingkan dengan 10 kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Gunungpati sebanyak 258 dan Tembalang 114. Pencapaian jumlah tersebut dapat disebabkan dengan adanya universitas-universitas besar yang berkembang pada wilayah tersebut yaitu Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang dan Universitas Negeri Semarang.

Menurut Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2017) data kepatuhan formal wajib pajak usaha kos yang didapat tersebut ada beberapa yang belum sesuai dengan pengertian dari kepatuhan formal itu sendiri. Dimana kepatuhan formal memiliki arti kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait atas pelaporan usahanya secara individu. Sedangkan masih ada beberapa data pada tabel 1.5 yang didapat dengan cara survei langsung petugas kepada setiap usaha kos yang ada. Tidak sedikit pemilik usaha kos yang menolak untuk memberikan keterangan atas usahanya. Sehingga total 466 pemilik usaha kos yang tersebut pada tabel 1.5 bersifat sementara sampai dengan tahun 2017 lalu. Apabila dikaitkan dengan tabel 1.4 yang menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan daerah yang didapat dari pajak hotel kategori kos sampai dengan tahun 2016 hanya sebesar 48,14% terhadap pajak hotel. Hal tersebut sangat tidak relevan dengan jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar sebanyak 466 dengan pengenaan tarif sebesar 10%. Sehingga diduga masih banyak wajib pajak terdaftar (patuh formal) belum melakukan kewajiban membayarkan utang pajaknya (patuh material).

Sampai dengan saat ini petugas terkait terus melakukan usaha guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemilik kos yang ada di Kota Semarang. Usaha yang telah dilakukan Dirjen Pajak kota Semarang salah satunya dengan melakukan sosialisasi rutin kepada seluruh wajib pajak pemilik kos yang ada di kota Semarang. Namun, hal tersebut tidak mendapat respon positif dari wajib pajak pemilik kos. Karena dari setiap sosialisasi yang dilakukan wajib pajak yang hadir tidak lebih dari 20 orang. Tingkat kepatuhan pajak tidak hanya dapat diciptakan oleh petugas pajak terkait tanpa didukung usaha dari wajib pajak itu sendiri.

Padahal apabila dilihat dari potensi usaha kos yang ada, pendapatan daerah kota Semarang yang didapat dari pajak kos akan sangat membantu dan memudahkan proses pembangunan yang ada di Semarang karena jumlahnya yang cukup banyak.

Sejak diterapkan sistem perpajakan di dunia, faktor penyebab kepatuhan pajak merupakan salah satu masalah yang selalu dipertanyakan. Tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki oleh setiap individu berbeda-beda, hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Menurut Heider (1958 dalam Jatmiko 2006) faktor internal merupakan faktor yang berada dibawah kendali individu itu sendiri, seperti kemampuan, keturunan dan pengetahuan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar individu tersebut, seperti pendidikan, lingkungan, kebudayaan dan sosial ekonomi. Faktor internal dan eksternal juga dapat didukung dengan alasan pribadi dari masing-masing individu dalam menentukan keputusannya melakukan sesuatu. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 1 variabel dependen yaitu kepatuhan dan 7 variabel independen yaitu pendapatan, lingkungan, sanksi pajak, sosialisasi dan pelayanan perpajakan, kesadaran, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, dan persepsi efektivitas sistem pembayaran pajak. Terdapat 2 teori yang mendasari pengambilan keputusan variabel independen tersebut, yaitu teori tindakan beralasan (*reasoned action theory*) dan teori atribusi (*attribution theory*). Teori tindakan beralasan merupakan teori yang mengatakan bahwa setiap individu dalam melakukan suatu tindakan didasari dengan 3 komponen yaitu niat berperilaku, sikap dan norma subjektif. Sedangkan teori atribusi mengatakan bahwa setiap individu sebelum melakukan suatu tindakan selalu melakukan pengamatan

terlebih dahulu terhadap perilaku seseorang. Apakah perilaku tersebut didasari oleh faktor internal atau eksternal. Teori atribusi merupakan teori yang mendukung teori tindakan beralasan.

Relevansi dengan penelitian ini, variabel independen sanksi, kesadaran dan persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas diadopsi dari faktor dasar norma, sikap dan perilaku serta kepercayaan yang dikemukakan oleh Fishben dan Azjen (1975 dikutip Yogatama 2014) dalam teorinya yaitu Teori Tindakan Beralasan (*Reasoned Action Theory*). Dimana faktor-faktor tersebut merupakan komponen dasar yang penting untuk membangun sifat individu dalam mengambil keputusan patuh atau tidak patuh pajak. Sedangkan variabel pendapatan, lingkungan sosialisasi dan pelayanan perpajakan serta persepsi efektivitas sistem pembayaran pajak diadopsi dari faktor internal dan eksternal yang dikemukakan oleh Heider (1958 dalam Jatmiko 2006) dalam teorinya yaitu Teori Atribusi (*Attribution Theory*). Dimana variabel pendapatan mengadopsi faktor eksternal yaitu ekonomi, variabel lingkungan mengadopsi faktor eksternal yaitu lingkungan, variabel sosialisasi dan pelayanan perpajakan mengadopsi faktor eksternal dan variabel persepsi efektivitas sistem pembayaran pajak mengadopsi faktor eksternal. Selain itu beberapa variabel independen seperti sanksi, kesadaran dan persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas yang mengadopsi komponen dasar dari teori tindakan beralasan diperkuat dengan teori atribusi. Variabel-variabel tersebut diatas diteliti untuk melihat seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel terhadap tingkat kepatuhan material wajib pajak kos.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 466 pemilik usaha kos yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak patuh formal. Sedangkan sampel pada penelitian ini sebanyak 110 wajib pajak pemilik usaha kos yang tersebar di Kecamatan Gunungpati dan Tembalang. Alasan pemilihan lokasi penelitian didasari dengan jumlah persebaran terbanyak dari pemilik usaha kos yang telah terdaftar dalam kategori patuh formal berada pada Kecamatan Gunungpati sebanyak 258 dan Kecamatan Tembalang 114. Sehingga dinilai dengan mengambil lokasi penelitian di kedua kecamatan tersebut sudah mampu melihat faktor yang mempengaruhi kepatuhan material pemilik usaha kos atas pajak hotel. Sampel tersebut diperoleh menggunakan metode *simple random sampling* dengan menyebarkan kuisioner kepada responden terpilih.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dilakukan penelitian mengenai **“Analisis Determinan Tingkat Kepatuhan Material Pemilik Usaha Kos Terhadap Pajak Hotel di Kota Semarang”**

1.2 Rumusan Masalah

Secara umum sejak resmi diberlakukannya sistem otonomi daerah, setiap daerah di Indonesia terus menggali potensi yang dimiliki daerahnya guna untuk mendapatkan suatu pendapatan tambahan. Pendapatan tersebut digunakan Pemerintah Daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Kota Semarang sebagai salah satu kota destinasi pelajar dan mahasiswa memiliki peningkatan permintaan tempat hunian sementara atau kos dan secara tidak langsung juga meningkatkan pembangunan usaha kos di kota ini. Sehingga Kota Semarang memiliki potensi yang tinggi apabila ditetapkan peraturan mengenai

pengenaan pajak hotel kategori kos. Hal tersebut didukung oleh data yang dirilis oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2015 yang mengatakan bahwa jumlah pemilik usaha kos yang terdaftar sebagai patuh formal sebanyak 466 pemilik.

Namun jumlah tersebut berbanding terbalik dengan realisasi pendapatan yang masih jauh dari target. Sampai dengan tahun 2016 realisasi yang dicapai hanya 48,14% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini sangat tidak relevan apabila dibandingkan dengan jumlah pemilik kos sebagai patuh pajak formal sebanyak 466 dengan pengenaan tarif pajak sebesar 10%. Apabila hanya 50 pemilik usaha kos sudah mengubah status patuh formalnya menjadi patuh material, realisasi pendapatan yang didapat Pemerintah Daerah Kota Semarang dari pengenaan pajak hotel kategori kos tentu sudah melampaui dari target anggaran yang ditetapkan. Namun fakta lapangan yang terjadi tidak demikian. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan material pemilik usaha kos atas pajak di Kota Semarang ini.

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap tingkat kepatuhan material pemilik usaha kos di Kota Semarang?
2. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap tingkat kepatuhan material pemilik usaha kos di Kota Semarang?
3. Bagaimana pengaruh sanksi sosial terhadap tingkat kepatuhan material pemilik usaha kos di Kota Semarang?

4. Bagaimana pengaruh sosialisasi dan pelayanan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan material pemilik usaha Kos di kota Semarang?
5. Bagaimana pengaruh kesadaran terhadap tingkat kepatuhan material pemilik usaha kos di Kota Semarang?
6. Bagaimana pengaruh persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas terhadap tingkat kepatuhan material pemilik usaha kos di Kota Semarang?
7. Bagaimana pengaruh persepsi efektivitas sistem pembayaran pajak terhadap tingkat kepatuhan material pemilik usaha kos di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel independen yang diteliti (pendapatan, lingkungan, sanksi pajak, sosialisasi dan pelayanan perpajakan, kesadaran, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, dan persepsi efektivitas sistem pembayaran pajak) terhadap tingkat kepatuhan material wajib pajak kos di Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan oleh pemerintah, akademik, masyarakat sampai dengan wajib pajak itu sendiri. Dari sisi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas informasi-informasi yang diberikan masyarakat mengenai masalah perpajakan yang dialami oleh rata-rata wajib pajak yang berstatus sebagai wajib pajak patuh formal dengan tidak meningkatkannya menjadi patuh pajak material. Dengan begitu dari hasil yang diperoleh dalam

penelitian ini pemerintah dapat dengan mudah membuat atau merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan tingkat kepatuhan material wajib pajak dalam hal ini wajib pajak yang memiliki usaha kos di Kota Semarang. Bagi akademik, hasil yang didapat dari penelitian ini diharap dapat menambah ilmu pengetahuan dari pengaruh masing-masing variabel yang ada didalam penelitian ini sehingga dapat membantu dalam melengkapi penelitian-penelitian yang akan datang. Bagi masyarakat dan wajib pajak, perolehan hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai wadah pembelajaran mengenai informasi-informasi tentang kewajiban membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dari masyarakat dan wajib pajak itu sendiri.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, ada beberapa bab yang dibahas oleh penulis dan memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini juga menyajikan beberapa tabel yang menguraikan data pendukung berupa data sekunder yang didapat dari instansi terkait penelitian dan data primer yang didapatkan dari hasil survei wawancara dengan salah satu petugas instansi terkait tersebut.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan terkait dengan teori-teori yang mendasari dan berhubungan dengan penelitian yaitu teori tindakan beralasan (*reasoned action theory*), dan teori atribusi (*attribution theory*), serta terdapat penjelasan mengenai masing-masing variabel independen penelitian. Selain itu diuraikan juga mengenai penelitian terdahulu yang terkait

dengan penelitian ini tentang kepatuhan pembayaran pajak. Pemaparannya sendiri didapatkan dari jurnal internasional, karya akhir, buku dan artikel.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yang meliputi definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, populasi dan penentuan sampel dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan terkait demografi penelitian, karakteristik responden dan hasil dari penelitian yang meliputi analisis data serta pembahasan sesuai dengan metode yang digunakan selama penelitian berlangsung.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini penulis menguraikan tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan serta mencakup saran-saran bagi peneliti selanjutnya untuk memperbaiki penelitian yang telah ada.